

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DALAM MENJAGA KEBUDAYAAN DAERAH BAHASA JAWA DIALEK BANTEN

Ahmad Fauzan, Roni Juwandi, & Qotrun Nida

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: fauzanamindjasuta15@gmail.com, ron_roju@untirta.ac.id, & nida@untirta.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk, sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang tersebar di dunia. Angka ini dapat mengimplikasikan bahwa keanekaragaman budaya, etnis, agama maupun linguistik yang dapat di temukan di dalam negara ini. Dengan begitu banyak jumlah kebudayaan di Indonesia di tiap daerah, tidak lupa juga dengan para pelaku/pelestari kebudayaan yang ada di tiap daerah dalam menjaga kebudayaannya di tiap daerah, sebagai upaya manifestasi berharga untuk bagaimana bisa dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, contoh kecilnya adalah bahasa, sampai saat ini masih konsisten dalam bahasa yaitu bahasa Indonesia, sedangkan bahasa-bahasa daerah merupakan kekayaan plural yang dimiliki bangsa Indonesia sejak jaman kerajaan nenek moyang. Bahasa adalah kebudayaan utuh dan proses sampai menjadi bahasa yang permanen dipakai cukup lama untuk bisa dijadikan bahasa. Karna secara dialek harus bisa menyesuaikan gaya komunikasi dan penamaan suatu benda/kata kerja di suatu kelompok masyarakat. Kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di suatu lokalitas didukung oleh masyarakat yang terikat pada aturan adat yang disepakati, telah berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi. Berbeda dengan kesenian modern yang cenderung lebih mudah berubah mengadopsi unsur-unsur luar, kesenian tradisional lebih cenderung lambat mengalami perubahan. Dikarenakan, secara umum kesenian tradisional ini memiliki ciri sebagai berikut: Pertama, ia memiliki jangkauan terbatas pada lingkungan kultur yang menunjangnya. Kedua, ia merupakan pencerminan dari suatu kultur yang berkembang secara perlahan, karena dinamika masyarakat yang menunjangnya memang demikian. Ketiga, ia tidak terbagi-bagi pada pengkotakkan spesialisasi. Keempat ia bukan merupakan hasil kreativitas individu individu tapi tercipta secara anonim bersama dengan sifat kolektivitas masyarakat yang menunjangnya.

Kata kunci: Bahasa, Budaya

Abstract

Indonesia is an archipelagic country that includes more than 17,000 islands inhabited by about 255 million people, a number that makes Indonesia the fourth country in terms of countries with a population spread across the world. This figure can imply that cultural, ethnic, religious and linguistic diversity can be found in this country. With so many cultures in Indonesia in each region, don't forget also the actors / cultural conservationists in each region in maintaining their culture in each region, as a valuable manifestation effort for how it can be continued by the next generation, a small example is language, until Currently, it is still consistent in the language, namely Indonesian, while regional languages are a plural wealth that has been owned by the Indonesian nation since the days of the ancestral kingdom. Language is a complete culture and the process until it becomes a permanent language is used long enough to become a language. Because in dialect one must be able to adjust the communication style and naming an object/verb in a community group. Traditional art that grows and develops in a locality is supported by people who are bound by agreed customary rules, which have been passed down from generation to generation. In contrast to modern art which tends to change more easily by adopting external elements, traditional art tends to be slower to change. Because, in general, this traditional art has the following characteristics: First, it has a limited reach in the cultural environment that supports it. Second, it is reflection of a culture that develops slowly, because the dynamics of the society that supports it are like that. Third, it is not divided into specialization categorization. Fourth, it is not the result of individual creativity but is created anonymously along with the collectivity of the community that supports it.

Keywords: *Language, Culture*

PENDAHULUAN

Pola hidup masyarakat masa kini dengan masa dahulu sangatlah berbeda hal ini juga dampak arus globalisasi sehingga perlu penanganan yang baik. Dampak lain dari globalisasi yaitu berkembangnya teknologi-teknologi canggih yang sangat membantu manusia namun juga dapat merusak mental dan moral generasi muda. Melihat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia saat ini lebih memilih kebudayaan asing yang mereka anggap lebih menarik ataupun lebih unik dan praktis.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk, sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang tersebar di dunia. Angka ini dapat mengimplikasikan bahwa keanekaragaman budaya, etnis, agama maupun linguistik yang dapat ditemukan di dalam negara ini. Dengan begitu banyak jumlah kebudayaan di Indonesia di tiap daerah, tidak lupa juga dengan para pelaku/pelestari kebudayaan yang ada di tiap daerah dalam menjaga kebudayaannya di tiap daerah, sebagai upaya manifestasi berharga untuk bagaimana bisa dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, contoh kecilnya adalah bahasa, sampai saat ini masih konsisten dalam bahasa yaitu bahasa Indonesia, sedangkan bahasa-bahasa daerah merupakan kekayaan plural yang dimiliki bangsa Indonesia sejak jaman kerajaan nenek moyang.

Bahasa adalah kebudayaan utuh dan proses sampai menjadi bahasa yang permanen dipakai cukup lama untuk bisa dijadikan bahasa. Karna secara dialek harus bisa menyesuaikan gaya komunikasi dan penamaan suatu benda/kata kerja di suatu kelompok masyarakat. Kesenian tradisional

yang tumbuh dan berkembang di suatu lokalitas didukung oleh masyarakat yang terikat pada aturan adat yang disepakati, telah berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi. Berbeda dengan kesenian modern yang cenderung lebih mudah berubah mengadopsi unsur-unsur luar, kesenian tradisional lebih cenderung lambat mengalami perubahan. Dikarenakan, secara umum kesenian tradisional ini memiliki ciri sebagai berikut: Pertama, ia memiliki jangkauan terbatas pada lingkungan kultur yang menunjangnya. Kedua, ia merupakan pencerminan dari suatu kultur yang berkembang secara perlahan, karena dinamika masyarakat yang menunjangnya memang demikian. Ketiga, ia tidak terbagi-bagi pada pengkotakan spesialisasi. Keempat, ia bukan merupakan hasil kreativitas individu individu tapi tercipta secara anonym bersama dengan sifat kolektivitas masyarakat yang menunjangnya.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ialah dengan penegasan lewat UUD 1945 dalam pasal 32, yaitu "pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, untuk bisa menegaskan bahwa kebudayaan merupakan pilar kehidupan bangsa". Saat terjadi perubahan UUD 1945 pada awal masa reformasi melalui proses amandemen, pemajuan kebudayaan tetap menjadi prioritas. *Pasal 32 UUD 1945* dikembangkan menjadi "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Undang-undang tersebut menjadi pegangan teguh dalam upaya menjaga dan melestarikan budaya bangsa, sehingga ini adalah menjadi bagian pekerjaan pemerintah dan warga negara untuk bisa

menjaga keutuhan kebudayaan di tiap-tiap daerah agar hal ini terus melekat pada masyarakat di dalam derasnya arus modernisasi. Dalam prosesnya juga kementerian pendidikan dan kebudayaan menciptakan *undang-undang nomor 5 tahun 2017* tentang pemajuan kebudayaan, dan UU ini berisikan sebagai pedoman untuk pemerintah melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan membina objek pemajuan kebudayaan di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.

Menjadikan UUD tersebut sebagai keseriusan pemerintah pusat untuk bisa menjaga warisan nenek moyang/kebudayaan asli bangsa Indonesia, bukan hanya diciptakan undang-undang saja dalam upaya menjaga, harus didukung juga praktik yang membuktikan secara fisik agar budaya tersebut bisa terlihat dan didengar oleh masyarakat Indonesia. Untuk menguatkan tata kelola kebudayaan, langkah ini dimulai dengan menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah (ppkd) di tingkat kabupaten/kota hingga ke level provinsi terkait 10 objek pemajuan kebudayaan (tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi nasional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga) lahirnya undang-undang ini amanat dari *pasal 32 ayat 1 UUD 1945* untuk memajukan kebudayaan.

Di jelaskan dalam undang-undang di atas mengenai kewenangan: pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Penyempurnaan undang-undang yang terbaru ini menjadi hal yang relevan dalam proses penyelenggaraan ketatanegaraan dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah adalah titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan.

Pengembangan suatu daerah dapat di sesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah tsb.

Dengan didukung beberapa undang-undang yang kuat secara konstitusional, ini mengartikan bahwa pemerintah daerah punya tugas untuk bisa mengembangkan daerahnya berdasarkan potensi dan keunggulan daerah untuk mencapai apa yang dituju, bagaimana kebudayaan juga sebagai nilai-nilai berharga disuatu daerah untuk bisa dikembangkan dan dijaga, maka dari itu dalam latar yang dijelaskan ini untuk bisa menemukan bagaimana peran pemerintah dalam menjalankan peran konstitusionalnya di wilayah untuk menjaga nilai kebudayaan daerah dan bentuk kearifan lokal. Yaitu, salah satu daerah yang akan penulis meneliti mengenai peranan pemerintah daerah dalam menjaga Bahasa daerah sebagai kearifan lokal, ialah kabupaten Serang, daerah yang terdapat di wilayah provinsi Banten.

Kabupaten Serang adalah salah satu daerah yang terdapat di wilayah provinsi Banten yang mempunyai sejarah panjang dalam proses perkembangan peradaban masyarakat Banten dari zaman masa kejayaan hindu-budha, kesultanan sampai dengan pemerintahan hari ini, secara konstitusional terbentuknya pemerintahan kabupaten Serang bagian dari implementasi undang-undang otonomi daerah.

Sejarah mencatat, kabupaten Serang adalah pusat pemerintahan Banten pada zaman kerajaan sunda dan kesultanan Banten, proses perkembangan peradaban sosial masyarakat dan kebudayaan begitu banyak di wilayah tsb, yang dimana wilayah kabupaten Serang begitu luas mencakup daerah-daerah kecil di dalamnya, kabupaten Serang mengalami proses peralihan kekuasaan 4 kali yang dimana sudah 32 berganti pemimpin daerah/bupati, di dalam buku sejarah yang ditulis oleh *H. Milwani microb* dan *H. M*

Mudjahid Chudari yang berjudul **“Catatan Masa Lalu Banten”** proses peralihan itu dari masa kerajaan sunda sampai dengan zaman penjajahan belanda dan jepang dan hari ini.

Sebelum di abad ke XVI, berita-berita tentang Banten belum banyak tercatat oleh sejarah, pada tanggal 19 desember 1948 pada waktu itu class/agresi ii. Baru serdadu belanda dapat memasuki daerah Banten/Serang untuk selama 1 (satu) tahun dan setelah kmb tahun 1949, belanda meninggalkan kembali daerah Banten/Serang, yang selanjutnya daerah Serang menjadi salah satu daerah kabupaten di wilayah propinsi jawa barat. Yang sekarang sejak tanggal 4 oktober 2000, terbentuknya propinsi Banten maka kabupaten Serang resmi menjadi bagian dari propinsi Banten. Kemudian sejak adanya jabatan regent atau bupati pada tahun 1826 sampai sekarang, telah terjadi 32 kali pergantian bupati. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan di Serang telah mengalami 4 (empat) kali masa peralihan kekuasaan/pemerintahan, yaitu:

1. Pemerintahan kesultanan kerajaan Banten yang berkuasa selama \pm 290 tahun, dimulai sejak sultan maulan hasanuddin yaitu tahun 1526 sampai tahun 1816. Dan saat berdirinya keratan surosowan sebagai pusat pemerintahanyang ditandai dengan penobatan pangeran sabakingking dengan pangeran hasanuddin pada tanggal 1 muharram 933 h / 8 oktober 1526 m, kemidian dijadikan landasan penetapan sebagai hari jadi kabupaten Serang.
2. Pemerintah hindia belanda yang berkuasa selama \pm 126 tahun yaitu pada tahun 1816 sampai tahun 1942.
3. Pemerintah jepang yang baru berkuasa selama \pm 3,6 tahun yaitu dari tahun 1942 sampai tahun 1945.

4. Pemerintah republik Indonesia dimulai sejak diproklamasikannya kemerdekaan republik Indonesia tanggal 17 agustus 1945 sampai sekarang.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten tingkat II Serang no.17 tahun 1985 tentang hari jadi kabupaten Serang pada bab. II penetapan hari jadi pasal 2 yaitu hari jadi kabupaten Serang ditetapkan pada tanggal 8 oktober tahun 1526 m.

Kabupaten Serang sudah berumur 493, umur yang cukup panjang dan tua bagi sebuah wilayah yang berdiri. Kebudayaan di tengah-tengah situasi arus modernisasi, dan perkembangan teknologi, dimana berpotensi, menggerus kebudayaan tradisional, sehingga perubahan sosial budaya sekarang yakni, perubahan masyarakat yang tertutup menjadi masyarakat terbuka. Ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi merubah secara mendasar kehidupan dunia ini dan kehidupan sehari-hari, Banten dalam masa perkembangan awalnya merupakan kota yang berfungsi sebagai pusat kerajaan yang bercorak maritim. Sejarah mencatat kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan islam yang cukup kuat di wilayah Jawa.

Mengingat kuatnya kekuasaan kerajaan pada waktu itu, maka perkembangan kebudayaannya pun cukup kuat. Kuatnya pengaruh budaya Banten, dalam hal ini menyangkut karya seni tidak terlepas dari peranan kerajaan Banten yang turut mempertahankan dan mengembangkan budaya seni khususnya, bahasa intrapersonal Jawa Dialek Banten, dimana terdapat beberapa program yang dibuat di wilayah kabupaten serang mengenai pelestarian bahasa Jawa Dialek Banten, langsung di sampaikan oleh :’ Dari yang di sampaikan secara pandangan pemangku kebijakan dan pegiat bahasa, kabupaten serang sudah mempunyai

program pelestarian bahasa jawa dialek banten, Di sampaikan langsung oleh mantan Kepala Seksi Pelestarian Bahasa Jawa Serang, **Dedi rusmunandi** di kantornya yang sekarang menjabat Kepala Seksi Pelestarian situs Cagar Budaya, “ berdasarkan **SK Bupati Nomor 423.5/ket.178-Hub org/2014**, tentang penetapan mata pelajaran mulok untuk jenjang SD, MI, SMA dan SMK pada satuan pendidikan di kabupaten Serang.

Ini sk sebagai upaya kita pemkab serang melestarikan bahasa jawa dialek Banten, dan kajian ini kita berikan kepada bidang kurikulum sebagai kajian untuk pelaksanaan teknis dalam melaksanakan program, sudah kita sosialisasikan kepada sekolah-sekolah yang sudah di tetapkan, sampai tahun ini belum ada pembaharuan sk, sehingga sk pertama masih berlaku sampai dengan hari ini. Beliau juga menambahkan sebagai pelaksan kebijakan, pada saat ini memang kebijakan ini ada hambatan, karna kita ketahui wilayah kabupaten serang tidak semua memakia Bahasa jawa dialek banten, kampung-kampung di daerah selatan dan timur itu mayoritas berbahasa sunda, seperti daerah anyer, ciomas dan wilayah pamarayan, sehingga tenaga pendidik juga yang tidak menguasai materi. Bahasa mulok ini Selain bahasa jawa dialek banten dijadikan mulok, ada beberapa lomba pentas seni yang menggunakan bahasa jawa dialek, contohnya pentas sosio-drama, puisi dan pidato. Wawancara ini langsung di dapatkan oleh penulis pada saat melakukan pra-penelitian.

Dari semua proses perubahan dan kekuasaan, banyak meninggalkan corak perilaku dan kebudayaan di masyarakat, dari jenis kebudayaan seni pertunjukkan sampai dengan bahasa yang akan sering digunakan oleh masyarakat sehari-hari, rentetan sejarah ini menjadi kajian historis dalam upaya pemerintah kebudayaan melihat lokal sebagai kekayaan

daerah yang potensial untuk bisa di lestarikan, banyaknya kebudayaan yang ada di wilayah masyarakat juga harus kita ketahui jenis-jenis kebudayaan yang ada di wilayah Banten, khususnya wilayah kabupaten Serang. Dan juga peneliti akan menjadikan bahasa jawa Banten sebagai objek penelitian.

Perlu di ketahui bahwa bahasa jawa Banten adalah perpaduan antara bahasa Jawa Demak, Jawa Cirebon dengan bahasa sunda penduduk asli di Banten saat pembentukan kesultanan Banten tahun 1625. Setelah berpuluh bahkan beratus tahun, perpaduan ketiga bahasa ini membentuk satu bahasa baru yang utuh, dengan aturan kebahasaan yang berbeda dengan aturan bahasa asal. Bersama dengan aksara pegon (tulisan arab berbahasa jawa Banten), kemudian menjadi bahasa resmi, dalam tulisan dan bahasa lisan, digunakan di kesultanan Banten sampai keruntuhannya pada tahun 1813. Sekarang, bahasa Jawa Banten inis secara umum, paling tidak digunakan pada tiga wilayah dari delapan kabupaten dan kota di provinsi Banten; sebagian besar di kecamatan kabupaten Serang, kota Serang dan kota Cilegon, bahasa jawa Banten ini mempunyai ke-khas-an, yakni banyak menggunakan /ē/ di akhir kata (seperti juga vocal /é/ dalam bahasa betawi); walau tidak semua daerah menggunakan hal demikian. Secara garis besar. Dalam hal pengucapan vocal /é/ yang berada di belakang kata ini, terdapat 2 versi:

1. Penduduk dari daerah yang letaknya dengan pusat pemerintahan kesultanan Banten, di wilayah kota Serang, dan sebagian besar daerah di wilayah kabupaten Serang, dengan tetap menggunakan bunyi [ē]; missal: kata /apē/ diucapkan [apē]
2. Penduduk dari daerah yang letaknya relatif jauh dari pusat pemerintahan kesultanan Banten dan atau berdekatan dengan daerah pengguna bahasa sunda,

akan mengucapkan /ẽ/ di akhir dengan bunyi [a]. Misal: kata /apẽ/ diucapkan [apa]. Kelompok ini ada di wilayah kecamatan baros, padarincang, ciomas, pabuaran, cikande.

Dalam bahasa jawa Banten, hanya dikenal dua strata bahasa: 1). Bahasa pergaulan. Dan 2). Bahasa bebasan. Bahasa pergaulan/pasaran biasa digunakan untuk berbicara dengan teman seumuran. Sedangkan, bebasan berorientasi lebih halus, kosa kata yang biasa digunakan dalam perkelahian, cacian atau hardikan tidak dikenal di dalam percakapan bahasa bebasan (Chudari, 2013: 2). Bahasa komunikasi intrapersonal masyarakat yang digunakan dari dahulu sampai hari ini, kebudayaan tak berbenda ini juga harus tetap terjaga di tengah-tengah arus modernisasi yang masuk di tiap wilayah, penggunaan bahasa daerah dialek Banten intrapersonal yang sudah sedikit terdengar penggunaannya dalam komunikasi masyarakat modern, maupun dalam hasil karya seni sastra, seperti yang dilansir oleh sebuah berita media online di banten, "penggunaan bahasa daerah dikalangan generasi muda mengalami penurunan. Alasannya tak banyak pelajar yang secara utuh berkomunikasi dengan bahasa daerah".

Hal tersebut disampaikan kepala kantor bahasa provinsi Banten M. Luthfi, di ruang kerjanya, senin (25/2/2019). "saat ini generasi muda yang tidak bisa berbahasa daerah. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan, karena kalau dibiarkan bahasa daerah di Banten akan masuk kategori punah," kata Lutfi kepada kabar Banten (diakses pada tanggal 28 November 2020, pukul 16.45), dan di lansir pula oleh wartahotnews.co.id: "Bahasa jawa Serang sebagai bahasa ibu terancam ditinggalkan jika tidak segera mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Kondisi ini menurut Toto ST Radik, Budayawan Serang karena

masyarakat lebih mudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional." Dilanjut "pemerintah harus banyak membuat sosialisasi, agar ini tersampaikan dengan tepat soal keberlangsungan penggunaan bahasa jawa dialek Banten.

Memang bisa kita lihat kebijakan ini benar adanya di dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, namun juga akhirnya menjadi pertanyaan besar upaya-upaya konkrit apa yang selanjutnya dilakukan Pemerintah Sehingga Peneliti akan melakukan pengamatan terhadap tubuh organisasi negara yang punya kewajiban dalam Judul Penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Peran Pemerintah Kabupaten Serang dalam menjaga kebudayaan daerah bahasa Jawa dialek Banten.

Rumusan masalah akan memberikan suatu arahan yang jelas untuk mengadakan penelaahan serta hasil analisis itu sendiri akan lebih nyata, sehingga peneliti harus membatasi masalah yang akan dianalisis, karena dapat memfokuskan pengkajiannya. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana peran pemerintah daerah kabupaten Serang dalam melestarikan bahasa jawa dialek Banten? dan apa kendala pelaksanaan pelestarian bahasa jawa dialek Banten?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah intsrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017: 9).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. (Sugiyono dalam unayah (2018:33). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara untuk melihat persepsi masyarakat/pelaku seni mengenai keberadaan kebudayaan/kearifan lokal sehingga bisa mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh *Informan*. Peneliti akan mewawancarai instansi salah satunya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

b. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono dalam Unayah (2018:34) (Nurgiansah, 2021) Studi Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk lisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang dimaksudkan adalah visi dan misi, surat tugas perintah, dan data – data dokumen hasil Operasi yang dilakukan

c. Studi Literasi

Studi Literasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengutipan yang dilakukan oleh peneliti dari buku – buku, jurnal, atau berita – berita mengenai

d. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian ini untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan

kebenaran dari sebuah desain penelitian (Sugiyono, 2018;229)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian

A. Teori peran (Role Theory)

Adalah teori yang merupakan perpaduan disiplin ilmu, teori, dan orientasi selain dari psikologi (Sarwono,2014:215). Sifat individual ditekankan dalam teori peran untuk mempelajari perilaku sesuai dengan posisinya sebagai pelaku sosial di lingkungan (Sarwono,2014:215). Individu yang berada dalam lingkungan kerja dituntut dapat berinteraksi dengan individu lain atau hal lain sebagai bagian dari pekerjaannya (Sarwono, 2014:215). Interaksi ini mengandung peran-peran dan harapan dari individu atas kinerjanya dalam suatu posisi (Sarwono,2014:215). Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Adapun syarat-syarat peran dalam soerjono soekanto (2002:243) (Nurgiansah, 2020) mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat

B. Pelestarian

Pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif. pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Pengertian mengenai "pelestarian budaya" yang dirumuskan dalam draft RUU tentang kebudayaan (1999) dijelaskan bahwa pengertian, pelestarian budaya berarti pelestarian terhadap eksistensi suatu kebudayaan dan bukan berarti membekukan kebudayaan di dalam bentuk-bentuknya yang sudah pernah dikenal saja. (Sedyawati, 2008:152).

C. Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintahan daerah yang bersifat wajib menurut UU No, 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah disebutkan sebagai berikut: Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota

D. Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai makna sebagai keseluruhan gagasan, perilaku serta hasil cipta karsa manusia yang diperoleh dari adaptasi manusia dengan lingkungannya (peraturan bersama menteri dalam negeri nomor 42 tahun 2009 dan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor 40 tahun 2009). Menurut suryono aryono (2002), pelaksanaan kebudayaan termasuk dalam golongan adat yang tidak mempunyai akibat hukum, hanya saja apabila tidak dilakukan oleh masyarakat, maka timbul rasa kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang menimpa dirinya. Kebudayaan adalah suatu kebudayaan yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku disuatu daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki kebudayaan sendiri-sendiri, seperti kebudayaan perkawinan, kebudayaan labuhan, kebudayaan yang dilakukan didaerah sebenarnya juga tidak terlepas dari unsur sejarah. Hukum adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, berlakunya suatu peraturan hukum adat, tampak dalam penetapan (putusan-putusan) misalnya putusan kepala adat sesuai dengan lapangan kopetensinya masing-masing.

E. Unsur-Unsur Kebudayaan

Unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia. Membagi kebudayaan yang ditemukan pada bangsa didunia dari sistem kebudayaan yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat perkotaan. Yakni suatu metode hidup yang diwarisi dari generasi ke generasi. Unsur yang terbentuk didalam tradisibisa disebut amat rumit dikarenakan terbentuk pada mekanisme agama serta politik, adat istiadat, sandangan, berbahasa, tempat tinggal, karya seni juga dengan. Sehingga tradisi bersifat rumit, abstrak serta berhubungan yang mengakibatkan dipelajari oleh masyarakat. Menurut koentjaningrat (2010) ada beberapa unsur yang terkait dengan pelaksanaan kebudayaan diantaranya adalah:

1. Tempat berlangsungnya kebudayaan, tempat yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebudayaan biasanya adalah tempat kramat atau bersifat sakral/suci, tidak setiap orang dapat mengunjungi tempat itu. Tempat tersebut hanya digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan saja, dalam hal ini adalah orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebudayaan seperti pemimpin kebudayaan.
2. Saat berlangsungnya kebudayaan/waktu pelaksanaan kebudayaan.
3. Waktu pelaksanaan kebudayaan adalah saat-saat tertentu yang dirasakan tepat untuk melangsungkan kebudayaan. Dalam kebudayaan rutin yang diselenggarakan tiap tahun biasanya ada patokan dari waktu pelaksanaan kebudayaan yang lampau.
4. Benda-benda atau alat dalam kebudayaan.
5. Benda-benda atau alat dalam pelaksanaan kebudayaan adalah sesuatu yang harus ada macam sesaji

yang berfungsi sebagai alat dalam pelaksanaan kebudayaan tersebut.

6. Orang-orang yang terlibat di dalamnya, orang-orang yang terlibat di dalamnya pelaksanaan kebudayaan adalah mereka yang bertindak sebagai pemimpin jalannya kebudayaan dan beberapa orang yang paham dalam ritual kebudayaan.

F. Sejarah Bahasa Jawa Dialek Banten

Perlu di ketahui bahwa Bahasa Jawa Dialek Banten adalah perpaduan antara bahasa Jawa Demak, Jawa Cirebon dengan bahasa Sunda penduduk asli di Banten saat pembentukan Kesultanan Banten tahun 1625. Setelah berpuluh bahkan hingga beratus tahun, perpaduan ketiga bahasa ini membentuk satu bahasa baru yang utuh, dengan aturan kebahasaan yang baru dan berbeda dengan aturan bahasa asal. Bersama dengan bahasa aksara pegob (tulisan Arab berbahasa Jawa Banten), kemudian menjadi bahasa resmi, dalam tulisan dan bahasa lisan, digunakan di masa kesultanan Banten sampai pada kerutuhannya pada tahun 1813. Bahasa Jawa Banten ini mempunyai ke-khas-an, yakni banyak menggunakan vokal /ē/ di akhir kata (seperti juga vokal /ẽ/ dalam bahasa Betawi); walau memang tidak semua wilayah menggunakan hal demikian, secara garis besar, dalam hal pengucapan vokal /ē/ yang berada di belakang kata ini, terdapat dua versi:

1. Penduduk dari daerah yang letaknya berdekatan dengan bekas pusat pemerintahan Kesultana Banten (daerah Banten Lama) dan yang berjauhan dengan daerah pengguna bahasa Sunda, dan akan melafalkan /ē/ ini dengan tetap bunyi [ẽ]; misal: kata /apē/ diucapkan [apẽ]. Termasuk kelompok ini adalah penduduk Kota Serang, Kota Cilegon, dan sebagian desa Kabupaten Serang

2. Penduduk dari daerah yang letaknya relatif jauh dari pusat pemerintahan Kesultanan Banten dan atau berdekatan dengan yang menggunakan bahasa Sunda, akan mengucapkan /*ẽ*/ di akhir kata dengan bunyi [a], misal: kata /*apẽ*/ di ucapkan [*apa*]. kelompok ini adalah penduduk wilayah di kecamatan Baros, Pabuaran, Ciomas, Padarincang, Cikande, Kragilan, Carenang, Kopo dan Taktakan yang semuanya berada di Kabupaten Serang

Dalam Bahasa Jawa Banten, hanya dikenal dua srata Bahasa: 1). Bahasa pergaulan, dan 2). Bahasa Bebasan. Bahasa pergaulan digunakan untuk berbicara dengan teman seangkatan umurnya, (walaupun banyak diantara mereka sendiri saling berbahasa bebasan), sedangkan bahasa bebasan digunakan kepada orang yang lebih tua dan atau digunakan kepada orang yang lebih tua dan atau orang yang dituakan. Bebasan berorientasi lebih halus, kosa kata yang biasa digunakan dalam perkelahian, cacian atau hardikan tidak dikenal dalam bebasan.

Pembahasan

Setiap peristiwa yang dialami peneliti dalam menjalankan penelitian. Peneliti mendapatkan banyak pengetahuan yang menambah khasanah ilmu peneliti, bukan hanya teori, peneliti melihat dan merasakan langsung peristiwa terjadi di lapangan. Seperti yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, fokus penelitian ini ialah Peran Pemerintah. Maka dari itu, peneliti coba untuk mendapatkan fakta-fakta dari berbagai pihak yang terkait untuk melihat sudah ada atau belum dengan baik atau tidak peraturan daerah tersebut.

Fakta-fakta lapangan peneliti dapatkan dari unsur pemerintah yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang; Bidang Kebudayaan,

Bidang SD, dan Komunitas Bahasa dan Penulis. Dari semua yang peneliti sebut informan ini berbagai data berupa fakta didapatkan dengan cara yang beranekaragam, seperti wawancara, dokumentasi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian bahasa daerah. Maka setelah peneliti melakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono 2017: 247). Maka hasil dari Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Serang dalam menjaga kebudayaan daerah Bahasa Jawa Dialek Banten di wilayah administrasi Kabupaten Serang maka hasilnya sebagai berikut:

Organization

Dalam suatu lembaga pemerintahan perlu memastikan bahwa tugas dan fungsi dari lembaga tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah diamanahkan, sehingga tidak keluar dari peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Charles O Jones (1996: 296) dalam Agustino (2016: 154), Aspek organisasi sendiri yakni pembentukan atau penataan sumberdaya, unit dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.

Aspek organisasi kali ini peneliti melihat bagaimana tugas dan fungsi, serta dari lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Surat keputusan Bupati yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang apakah sesuai dalam

menjalankan isi SK tersebut yang berbunyi; Penetapan Bahasa Jawa dialek Banten menjadi Pelajaran Mulok dari tingkat SD sampai SMP.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam aspek organisasi kali ini, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam aspek organisasi yakni berkaitan dengan tugas dan fungsi dari beberapa lembaga yang menjadi narasumber dari penelitian kali ini, melihat daripada tugas dan fungsi dari beberapa instansi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dinas yang di tetapkan sebagai pelaksana Surat Keputusan Bupati yang bertanggung jawab dengan pelaksanaan SK Bupati tersebut.

Dalam pelaksanaan implementasinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang memiliki beberapa tujuan atau visi dan misi yang harus sinergis dengan tujuan dari pembangunan pemerintahan Kabupaten Serang. Sesuai dengan gambar tersebut bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki visi dan misi yang tidak keluar dari tujuan pembangunan pemerintah Kabupaten Serang yaitu tetap mengedepankan visi mewujudkan Kabupaten yang semakin maju, sejahtera, berkeadilan dan agamis. Kemudian, terkhusus pada kasus pelestarian yang dimana Bebasan bahasa jawa dialek banten ini menggambarkan karakter warga asli Banten, yang dimana mengandung arti kesopanan. Instansi yang bergerak pelestarian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tentu memiliki unit atau bagian dalam struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sendiri yang berfokus khusus pada Pelestarian Kebudayaan Daerah sehingga mampu memaksimalkan pelaksanaan *SK Bupati Nomor 423/ket.207 -Hub org/2020 mengenai pelestarian Bahasa Jawa Dialek Banten sebagai Mulok pelajaran SD dan SMP*". Sesuai gambar tersebut

bahwa sudah jelas struktur organisasi yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri terdapat bidang khusus yang membidangi Pelestarian Bahasa Daerah Serang yaitu bidang SD dan SMP dimana juga yang ikut terlibat dalam pelaksanaan Mulok Bahasa Daerah yang dibantu oleh beberapa seksi yaitu: Seksi Sekolah Dasar, Seksi SMP, dan Seksi Pelestarian cagar budaya dan Museum.

Adapun Program kerja dalam yang terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri dalam menangani aktivitas Pelestarian Bahasa Jawa Dialek Banten di Kabupaten Serang sendiri melalui sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan oleh peneliti, bahwa peneliti melihat bukti pelaksanaan Surat Keputusan Bupati.

Interpretation

Suatu lembaga pemerintah dalam melaksanakan amanah peraturan daerah tentu mempunyai dan memahami isi dari SK tersebut, dan tahu sejauh mana Peran Pemerintah dalam menjaga Bahasa daerah Jawa Dialek Banten tersebut berjalan. Menurut Charles O Jones (1996: 296) dalam Agustino (2016: 154) yakni menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

Aspek Interpretasi kali ini peneliti melakukan penelitian kepada lembaga eksekutif dan Komunitas Bahasa. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam aspek interpretasi ini, melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan oleh peneliti dengan beberapa narasumber seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Sunggono (1994: 149-153) faktor-faktor penghambat implementasi salah satunya ialah Isi kebijakan dimana implementasi gagal karena masih samarnya isi kebijakan, apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana, dan penerapan prioritas, atau program-

program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Selaras dengan teori tersebut, bahwa hasil dari peneliti melakukan wawancara, kepada Pihak Kepala Seksi Sekolah Dasar Pemerintah bahwa setiap SK yang sudah ditetapkan wajib untuk dilakukan sosialisasi SK tersebut.

Kemudian, peneliti melakukan observasi kepada Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa program sosialisasi tersebut dan belum dilaksanakan kembali, adapun terakhir dilakukan yaitu 2018 sebelum pandemi. Kecenderungan masyarakat tutur ketika berinteraksi dengan yang lainnya adalah menuturkan bahasa yang dapat dimengerti satu sama lain atau dengan kata lain bahasa memiliki kejelasan (*intelligibility*) untuk membuat mereka menjadi bagian dari komunitas tersebut. Hal itu juga membuat mereka tidak bisa menuturkan hanya satu bahasa saja tanpa mengetahui bahasa lainnya. Jika membahas pergeseran bahasa, secara otomatis berhubungan dengan pemertahanan bahasa dan kepunahan bahasa. Fenomena bahasa ini adalah kumpulan pengaruh dari adanya pilihan bahasa. Pergeseran bahasa semata-mata berarti penggunaan bahasa yang sangat terbatas, baik dari segi penutur maupun tempat di mana bahasa itu dituturkan. Sebaliknya, pemertahanan bahasa adalah jika bahasa tersebut tetap digunakan meskipun dalam kondisi sebagai bahasa minoritas yang jumlah penuturnya tidak banyak karena dituturkan di antara bahasa yang mayoritas. Kepunahan bahasa akan terjadi jika bahasa tersebut tidak ada lagi penuturnya dan posisinya diganti oleh bahasa yang sebagian besar menggunakan bahasa Negara.

Application

Suatu Peraturan Daerah terlihat berjalan dengan baik atau tidaknya lewat aplikasi atau penerapan yang dilakukan

oleh pemangku kebijakan kepada obyek kebijakan yaitu masyarakat Kota Serang. Dalam hal ini peneliti menanyakan tentang bagaimana proses penerapannya dilapangan serta apa hambatan yang terjadi dilapangan. Charles O Jones (1996: 296) dalam Agustino (2016: 154) mengungkapkan yakni penerapan adalah ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau yang lainnya disesuaikan dengan tujuan dan perlengkapan program.

Aspek kali ini, aspek penerapan, dalam hal ini aspek penerapan melihat proses bagaimana pelaksanaan operasi minuman keras berlangsung dan bagaimana proses dalam pelaksanaannya serta melihat bagaimana hambatan yang terjadi disaat proses penerapan Surat Keputusan Bupati itu sendiri.

Dalam pelaksanaan proses pelaksanaan penerapan SK Bupati ini tentu agar memiliki legalitas jelas dalam pelaksanaannya, sesuai dengan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri memiliki surat tugas dalam pelaksanaan.

Sesuai dengan gambar tersebut bahwa bukti dari hasil adanya SK bupati tersebut, terciptanya buku silabus mata pelajaran Bahasa Jawa Serang tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Maka dari itu, pentingnya penelitian kali ini memang dirasakan oleh peneliti. Secara sadar peneliti melihat banyaknya kekurangan sosialisasi dan edukasi terhadap semua yang terlibat dalam pelaksanaan program SK Bupati ini, pentingnya kita kampanyekan secara luas mengenai Bahasa Asli Daerah banten yang sudah ada sejak 1 abad silam di wilayah Kabupaten Serang. Hal yang peneliti bahas diatas bagian dari fakta dilapangan dan baru memunculkan satu instansi pemerintah Kabupaten Serang, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Satu hal lagi yang peneliti kemukakan terkait, interpretasi

atau pemahaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang SK Bupati.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memiliki kesimpulan dalam penelitian ini yang diuraikan berdasarkan hasil akhir dari keseluruhan penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti kali ini menggunakan Teori dari Charles O Jones yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan akan berjalan efektif jika memiliki 3 aspek yakni Organisasi, Interpretasi dan Penerapan, dimana ketiga aspek tersebut digunakan untuk penelitian oleh peneliti dalam menilai peran pemerintah Kabupaten Serang Dalam Menjaga Kebudayaan Daerah Bahasa Jawa Dialek Banten.

Sesuai dengan uraian yang peneliti tulis diatas, hasil daripada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa ada beberapa hal yang akan peneliti uraikan dibawah ini sesuai dengan apa yang di dapatkan oleh peneliti di lapangan serta melalui wawancara dan dokumentasi. Peneliti menilai bahwa terdapat program pemerintah yang sudah di keluarkan dan di jalankan yaitu mengenai Pelestarian Bahasa Daerah, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada sesuai dengan hasil dari wawancara peneliti dengan pihak Dinas Pendidikan dan kebudayaan. Namun, saat ini program Pelestarian Bahasa Daerah tersebut tidak berjalan dengan maksimal, bahkan menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, program Pelestarian menjadi masukan untuk para Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditahun depan, untuk diadakannya program tersebut. Program Pelestarian Bahasa Daerah adalah Hal yang penting dilakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat akan tahu, ada aturan yang melestarikan Bahasa daerah yang

beriringan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam hal ini peneliti menganggap bahwa Pemerintah Kabupaten Serang sudah melakukannya perannya sebagai pemangku dan pelaksana kebijakan soal pelestarian Bahasa daerah berjalan dengan baik.

Tidak hanya program Bahasa daerah menjadi pelajaran di pendidikan formal dalam implementasinya, namun ada beberapa kegiatan bersifat seni dan perlombaan yang di adakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu adanya lomba pidato, sosio-drama yang menggunakan bahasa jawa dialek Banten. Surat Keputusan tersebut yakni masih berlaku sampai dengan hari belum ada pembaharuan oleh Bupati, sesuai hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Kebudayaan bahwa di pemerintah masih menjalankan program itu di tiap Pendidikan formal tingkat Dasar sampai dengan Atas yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan, yaitu masih dari bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri.

Kemudian, yang menjadi evaluasi dalam wawancara mendalam, peneliti menemukan hal-hal yang harus menjadi evaluasi terhadap pelestarian Bahasa sampai saat ini, masih banyak yang belum memahami bahwa Bahasa Jawa Banten yang kami maksud adalah Bahasa "Bebasan" artinya kita sampaikan Bahasa komunikasi yang lembut, bukan Bahasa Jawa Banten Bahasa Pasar atau Bahasa umunya yang dipakai umumnya, karna Banten punya 2 jenis Bahasa dalam Bahasa Jawa Banten, Bahasa Jawa Pasar dan Bahasa Jawa lembut, di Kabupaten Serang dari kurangnya pemahaman soal itu, maka dari itu Pemerintah Harus lebih lagi untuk mensosialisasikan yang di maksud Bahasa yang harus di lestarikan, dari peneliti, dari proses pelaksanaan, sedangkan dalam SK Bupati tersebut belum mengatur kepada OPD lain untuk memasukkan unsur Bahasa

Daerah di tiap program Dinas lainnyat. Dalam hal ini peneliti menilai bahwa pelaksanaan SK tersebut sudah ada.

Dari uraian di atas, mengenai pelestarian Bahasa Daerah yang peneliti lakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan di mulai sudah adanya program pelestarian Bahasa daerah Jawa Banren dari pemerintah Kabupaten Serang khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pelaksana Surat Keputusan tersebut, kemudian masih banyaknya yang harus di lakukan evaluasi, yaitu dalam proses pembeleajaran masih banyaknya guru yang tidak menguasai Bahasa Bebasan Jawa Banten ini, sehingga kesulitan dalam menyampaikan. Tanggung jawab masyarakat untuk memelihara dan mempertahankan bahasa daerah sangat dibutuhkan demi menjaga kekayaan bangsa Indonesia. Para pengambil kebijakan dan institusi terkait hendaknya memberikan perhatian terhadap masalah yang dihadapi dan memberikan solusi yang tepat agar kepunahan bahasa dapat dihindari sebisa mungkin. Tentu saja dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk melakukan usaha-usaha yang berkenaan dengan pemertahanan bahasa daerah, khususnya dan pelestarian budaya pada umumnya. Usaha pemertahanan bahasa dapat dimulai dari lingkup yang lebih kecil, yaitu membiasakan penggunaan bahasa daerah dalam lingkungan keluarga, terutama pada anak-anak.

Demikian dengan uraian diatas tersebut peneliti menganggap bahwa Pemerintah Kabupaten Serang sudah menjalankan perannya untuk melakukan pelestarian Bahasa Jawa Banten, dinilai dari aspek-aspek yang berjalan sesuai dengan uraian yang peneliti tulis diatas.

Saran yang berkaitan dengan penelitian diatas, ialah: untuk Pemerintah Kabupaten Serang (Bupati & Wakil): Optimalisasikan program Pelestarian dalam kehidupan bermasyarakat, dan dijadikan program untuk semua OPD agar menjadikan Bahasa sebagai karakter kuat daerah, lakukan pengembangan agar Bahasa daerah menjadi ciri identitas karakter masyarakat, dan mengembangkan Program semua Dinas. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang diantaranya membuat Program penguatan terhadap Tenaga Pendidik agar menguasai Bahasa Jawa Banten dan mengoptimalkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dalam upaya Melestarikan Bahasa Jawa Dialek Banten, Khususnya Bidang Kebudayaan. Untuk Masyarakat, harus paham secara utuh Bahasa asli daerahnya, yaitu bebasan Bahasa Jawa Dialek Banten, dan untuk Peneliti selanjutnya, masyarakat Harus paham betul Bahasa asli daerahnya, yaitu Bebasan Bahasa Jawa Dialek Banten, dan peneliti selanjutnya diharapkan mempersiapkan diri dalam proses pengumpulan dan pengambilan data agar penelitian bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryono, Suryono. (2002) Judul, Pengertian Kebudayaan Tersedia (Online)
- Creswell, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Creswell, Jhon W. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dian Lorosae (2019) ; UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN BUDAYA RIMPUPIDA DI KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 (Study Kasus Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima Tahun 2019)

- Encep Suherman (2015) dalam jurnal penelitian yang berjudul variasi penggunaan bahasa dan pemertahanan bahasa jawa Serang di cilegon provinsi Banten, sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan garut
- Halwany Mihrob, A.Mudjahid Chudari. (1989). Catatan masa lalu banten. Sahabat. Serang. Hal 30-43
- Meti Istimurti (2013) dalam jurnal penelitian yang berjudul Pemertahanan Dan Revitalisasi Bahasa Jawa Dialek Banten, SMA Negeri 6 Kota Serang
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rosdakarya. Bandung. Hal 4-5 dan 330-332
- Nurgiansah, T. H. (2020). Filsafat Pendidikan. In *Banyumas: CV Pena Persada*.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila. In *Solok: CV Mitra Cendekia Media*.
- Patilima, Hamid. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta. Hal 101- 105.
- Sugiyono, 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. . Bandung. Alfabeta. Hal 62-101.
- Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), (Bandung : Alfabeta, hlm. 397
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian. Bandung. Alfabeta.
- Undang – Undang Dasar 1945 dalam pasal 32 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Undang – Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan Nasional
- Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang wewenang otonom daerah